



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, telah ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);

4. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 226);

5. Keputusan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

5. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: PER-03/M.EKON/08/2008 tentang Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);
8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penunjukan Para Pejabat Dalam Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yang Diberi Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian dan lain sebagainya di Bidang Kepegawaian;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.**

**Pasal 1**

Menetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.

**Pasal 2**

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan/atau Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus menetapkan rincian kelas jabatan bagi masing-masing pelaksana sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 3 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

**Pasal 3**

Kelas Jabatan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini, mulai berlaku sejak pegawai diangkat dan diambil sumpahnya dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.

**Pasal 4**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini, maka Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 5**

Penetapan Kelas Jabatan untuk setiap pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan pendelegasian wewenang yang telah ditetapkan.

Pasal 6 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

**Pasal 6**

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 September 2015

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**DARMIN NASUTION**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 September 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**YASONNA H. LAOLY**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1440**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan  
Hubungan Masyarakat,



Elen Setiadi, S.H., M.S.E.  
NIP. 197109011996031001



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN  
NOMOR : 7 TAHUN 2015  
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2015

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Keterangan
<b>Sekretariat Kementerian Koordinator</b>			
1.	Sekretaris Kementerian Koordinator	17	
2.	Kepala Biro Perencanaan	15	
3.	Kepala Bagian Program dan Anggaran	13	
4.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I	11	
5.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II	11	
6.	Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran	11	
7.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	13	
8.	Kepala Subbagian Organisasi	11	
9.	Kepala Subbagian Tata Laksana	11	
10.	Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	11	
11.	Kepala Bagian Data dan Sistem Informasi	13	
12.	Kepala Subbagian Pengumpulan Data	11	
13.	Kepala Subbagian Pengolahan dan Penyajian Data	11	
14.	Kepala Subbagian Sistem Informasi	11	
15.	Kepala Bagian Fasilitas Penguatan Kinerja	13	
16.	Kepala Subbagian Pengembangan Manajemen Kinerja	11	
17.	Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi Kinerja	11	
18.	Kepala Subbagian Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	11	
19.	Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat	15	
20.	Kepala Bagian Hukum	13	
21.	Kepala Subbagian Analisis Peraturan Perundang-undangan	11	
22.	Kepala Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	11	
23.	Kepala Subbagian Advokasi Hukum	11	



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Keterangan
24.	Kepala Bagian Persidangan	13	
25.	Kepala Subbagian Penyiapan Persidangan	11	
26.	Kepala Subbagian Fasilitasi Pelaksanaan Persidangan	11	
27.	Kepala Subbagian Dokumentasi Persidangan	11	
28.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	13	
29.	Kepala Subbagian Hubungan Kelembagaan dan Pengelolaan Opini Publik	11	
30.	Kepala Subbagian Layanan Pengaduan dan Informasi Publik	11	
31.	Kepala Subbagian Publikasi	11	
32.	Kepala Bagian Fasilitasi Penyiapan Naskah Menteri	13	
33.	Kepala Subbagian Fasilitasi Penyiapan Naskah Menteri - I	11	
34.	Kepala Subbagian Fasilitasi Penyiapan Naskah Menteri - II	11	
35.	Kepala Subbagian Fasilitasi Penyiapan Naskah Menteri - III	11	
36.	Kepala Biro Umum	15	
37.	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	13	
38.	Kepala Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia	11	
39.	Kepala Subbagian Mutasi dan Penilaian Prestasi Kerja	11	
40.	Kepala Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia	11	
41.	Kepala Bagian Keuangan	13	
42.	Kepala Subbagian Verifikasi – I	11	
43.	Kepala Subbagian Verifikasi – II	11	
44.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	11	
45.	Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara	13	
46.	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan	11	
47.	Kepala Subbagian Penatausahaan Aset Tetap dan Pemeliharaan	11	
48.	Kepala Subbagian Penatausahaan Barang Persediaan	11	
49.	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha	13	
50.	Kepala Subbagian Urusan Dalam	11	
51.	Kepala Subbagian Protokol	11	



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Keterangan
52.	Kepala Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan	11	
53.	Kepala Subbagian Tata Usaha Menko	11	
54.	Kepala Subbagian Tata Usaha Sesmenko	11	
55.	Kepala Subbagian Tata Usaha Staf Ahli	11	
<b>Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan</b>			
56.	Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan	17	
57.	Asisten Deputi Fiskal	15	
58.	Kepala Bidang Penerimaan Negara	13	
59.	Kepala Subbidang Penerimaan Pajak	11	
60.	Kepala Subbidang Penerimaan Negara Bukan Pajak	11	
61.	Kepala Bidang Pengeluaran Negara dan Pembiayaan	13	
62.	Kepala Subbidang Pengeluaran Negara	11	
63.	Kepala Subbidang Pembiayaan	11	
64.	Kepala Bidang Program dan Tata Kelola	13	
65.	Kepala Subbidang Program	11	
66.	Kepala Subbidang Tata Kelola	11	
67.	Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran	15	
68.	Kepala Bidang Moneter	13	
69.	Kepala Subbidang Stabilitas Moneter	11	
70.	Kepala Subbidang Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran	11	
71.	Kepala Bidang Neraca Pembayaran dan Posisi Investasi Internasional	13	
72.	Kepala Subbidang Analisis Neraca Pembayaran	11	
73.	Kepala Subbidang Analisis Posisi Investasi Internasional	11	
74.	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil	15	
75.	Kepala Bidang Ekonomi Daerah	13	
76.	Kepala Subbidang Ekonomi Kawasan Barat Indonesia	11	
77.	Kepala Subbidang Ekonomi Kawasan Timur Indonesia	11	
78.	Kepala Bidang Sektor Riil	13	
79.	Kepala Subbidang Sektor Riil Barang	11	



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Keterangan
80.	Kepala Subbidang Sektor Riil Jasa	11	
81.	Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	15	
82.	Kepala Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	13	
83.	Kepala Subbidang Pasar Modal	11	
84.	Kepala Subbidang Lembaga Keuangan Bukan Bank	11	
85.	Kepala Bidang Perbankan	13	
86.	Kepala Subbidang Perbankan Umum	11	
87.	Kepala Subbidang Perbankan Syariah	11	
88.	Asisten Deputi Badan Usaha Milik Negara	15	
89.	Kepala Bidang Badan Usaha Milik Negara Industri	13	
90.	Kepala Subbidang Usaha Agro dan Industri Strategis	11	
91.	Kepala Subbidang Usaha Energi, Logistik dan Perhubungan	11	
92.	Kepala Bidang Badan Usaha Milik Negara Usaha Jasa	13	
93.	Kepala Subbidang Usaha Jasa Keuangan	11	
94.	Kepala Subbidang Usaha Jasa Non Keuangan	11	
<b>Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian</b>			
95.	Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian	17	
96.	Asisten Deputi Pangan	15	
97.	Kepala Bidang Produksi dan Distribusi Pangan	13	
98.	Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Produksi dan Distribusi Pangan	11	
99.	Kepala Subbidang Pengendalian Kebijakan Produksi dan Distribusi Pangan	11	
100.	Kepala Bidang Konsumsi dan Cadangan Pangan	13	
101.	Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Konsumsi dan Cadangan Pangan	11	
102.	Kepala Subbidang Pengendalian Kebijakan Konsumsi dan Cadangan Pangan	11	
103.	Kepala Bidang Program dan Tata Kelola	13	
104.	Kepala Subbidang Program	11	
105.	Kepala Subbidang Tata Kelola	11	
106.	Asisten Deputi Peternakan dan Perikanan	15	





**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Keterangan
107.	Kepala Bidang Peternakan	13	
108.	Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Peternakan	11	
109.	Kepala Subbidang Pengendalian Kebijakan Peternakan	11	
110.	Kepala Bidang Perikanan	13	
111.	Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Perikanan	11	
112.	Kepala Subbidang Pengendalian Kebijakan Perikanan	11	
113.	Asisten Deputi Perkebunan dan Hortikultura	15	
114.	Kepala Bidang Perkebunan	13	
115.	Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Perkebunan	11	
116.	Kepala Subbidang Pengendalian Kebijakan Perkebunan	11	
117.	Kepala Bidang Hortikultura	13	
118.	Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Hortikultura	11	
119.	Kepala Subbidang Pengendalian Kebijakan Hortikultura	11	
120.	Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian	15	
121.	Kepala Bidang Prasarana Pangan dan Pertanian	13	
122.	Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Prasarana Pangan dan Pertanian	11	
123.	Kepala Subbidang Pengendalian Kebijakan Prasarana Pangan dan Pertanian	11	
124.	Kepala Bidang Sarana Pangan dan Pertanian	13	
125.	Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Sarana Pangan dan Pertanian	11	
126.	Kepala Subbidang Pengendalian Kebijakan Sarana Pangan dan Pertanian	11	
127.	Asisten Deputi Agribisnis	15	
128.	Kepala Bidang Pengembangan Usaha Agribisnis	13	
129.	Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Pengembangan Usaha Agribisnis	11	
130.	Kepala Subbidang Pengendalian Kebijakan Pengembangan Usaha Agribisnis	11	



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Keterangan
131.	Kepala Bidang Kelembagaan Agribisnis	13	
132.	Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Kelembagaan Agribisnis	11	
133.	Kepala Subbidang Pengendalian Kebijakan Kelembagaan Agribisnis	11	
<b>Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>			
134.	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	17	
135.	Asisten Deputi Produktivitas Energi	15	
136.	Kepala Bidang Produktivitas Energi Konvensional	13	
137.	Kepala Subbidang Produktivitas Hulu Energi Konvensional	11	
138.	Kepala Subbidang Produktivitas Hilir Energi Konvensional	11	
139.	Kepala Bidang Produktivitas Energi Non Konvensional	13	
140.	Kepala Subbidang Produktivitas Hulu Energi Non Konvensional	11	
141.	Kepala Subbidang Produktivitas Hilir Energi Non Konvensional	11	
142.	Kepala Bidang Program dan Tata Kelola	13	
143.	Kepala Subbidang Program	11	
144.	Kepala Subbidang Tata Kelola	11	
145.	Asisten Deputi Infrastruktur Energi	15	
146.	Kepala Bidang Infrastruktur Energi Konvensional	13	
147.	Kepala Subbidang Eksplorasi, Produksi dan Transmisi Energi Konvensional	11	
148.	Kepala Subbidang Pengolahan dan Distribusi Energi Konvensional	11	
149.	Kepala Bidang Infrastruktur Energi Non Konvensional	13	
150.	Kepala Subbidang Eksplorasi, Produksi dan Transmisi Energi Non Konvensional	11	
151.	Kepala Subbidang Pengolahan dan Distribusi Energi Non Konvensional	11	
152.	Asisten Deputi Industri Ekstraktif	15	
153.	Kepala Bidang Industri Ekstraktif Energi	13	
154.	Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Industri Ekstraktif Energi	11	



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Keterangan
155.	Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Industri Ekstraktif Energi	11	
156.	Kepala Bidang Industri Ekstraktif Mineral	13	
157.	Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Industri Ekstraktif Mineral	11	
158.	Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Industri Ekstraktif Mineral	11	
159.	Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan	15	
160.	Kepala Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan	13	
161.	Kepala Subbidang Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	11	
162.	Kepala Subbidang Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu	11	
163.	Kepala Bidang Pengelolaan Kawasan Hutan	13	
164.	Kepala Subbidang Penggunaan Kawasan Hutan	11	
165.	Kepala Subbidang Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan Hutan	11	
166.	Asisten Deputi Pelestarian lingkungan Hidup	15	
167.	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	13	
168.	Kepala Subbidang Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup	11	
169.	Kepala Subbidang Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	11	
170.	Kepala Bidang Perubahan Iklim	13	
171.	Kepala Subbidang Mitigasi Perubahan Iklim	11	
172.	Kepala Subbidang Adaptasi Perubahan Iklim	11	
<b>Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</b>			
173.	Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	17	
174.	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif	15	
175.	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	13	
176.	Kepala Subbidang Pengembangan Produk Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	11	
177.	Kepala Subbidang Perlindungan dan Pemasaran Produk Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	11	



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Keterangan
178.	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek	13	
179.	Kepala Subbidang Pengembangan Produk Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek	11	
180.	Kepala Subbidang Perlindungan dan Pemasaran Produk Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek	11	
181.	Kepala Bidang Program dan Tata Kelola	13	
182.	Kepala Subbidang Program	11	
183.	Kepala Subbidang Tata Kelola	11	
184.	Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan	15	
185.	Kepala Bidang Pengembangan Potensi dan Komoditas Ekonomi Kawasan	13	
186.	Kepala Subbidang Promosi Potensi Bahan Baku Lokal	11	
187.	Kepala Subbidang Fasilitasi Peningkatan Nilai Tambah Potensi Ekonomi Kawasan	11	
188.	Kepala Bidang Pengembangan dan Optimalisasi Sarana Pendukung Ekonomi Kawasan	13	
189.	Kepala Subbidang Perencanaan Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kawasan	11	
190.	Kepala Subbidang Optimalisasi Pengembangan Sarana Pendukung Ekonomi Kawasan	11	
191.	Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan	15	
192.	Kepala Bidang Kemudahan Wirausaha	13	
193.	Kepala Subbidang Penyelesaian Permasalahan Pengembangan Wirausaha	11	
194.	Kepala Subbidang Pengembangan Peluang dan Pasar Wirausaha	11	
195.	Kepala Bidang Penempatan dan Penciptaan Wirausaha	13	
196.	Kepala Subbidang Penempatan dan Pembibitan Wirausaha	11	
197.	Kepala Subbidang Inkubator Wirausaha	11	
198.	Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	15	
199.	Kepala Bidang Peningkatan Daya Saing Koperasi	13	
200.	Kepala Subbidang Penguatan Kelembagaan dan Penyelesaian Permasalahan Koperasi	11	
201.	Kepala Subbidang Pengembangan Usaha	11	



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Keterangan
	Koperasi		
202.	Kepala Bidang Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	13	
203.	Kepala Subbidang Peningkatan Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	11	
204.	Kepala Subbidang Peningkatan Daya Saing Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	11	
205.	Asisten Deputi Ketenagakerjaan	15	
206.	Kepala Bidang Penciptaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga Kerja	13	
207.	Kepala Subbidang Pengembangan Peluang Kerja dan Lembaga Peningkatan Kapasitas	11	
208.	Kepala Subbidang Sertifikasi Kompetensi dan Kerja Sama Internasional	11	
209.	Kepala Bidang Harmonisasi Hubungan Industrial	13	
210.	Kepala Subbidang Pengembangan Lembaga Mediasi	11	
211.	Kepala Subbidang Peningkatan Kerja Sama Tenaga Kerja dan Perusahaan	11	
<b>Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri</b>			
212.	Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	17	
213.	Asisten Deputi Pengembangan Investasi	15	
214.	Kepala Bidang Kemudahan dan Insentif Investasi	13	
215.	Kepala Subbidang Kemudahan Investasi	11	
216.	Kepala Subbidang Insentif Investasi	11	
217.	Kepala Bidang Perluasan dan Promosi Investasi	13	
218.	Kepala Subbidang Perluasan Investasi	11	
219.	Kepala Subbidang Promosi dan Kerja Sama Investasi	11	
220.	Kepala Bidang Program dan Tata Kelola	13	
221.	Kepala Subbidang Program	11	
222.	Kepala Subbidang Tata Kelola	11	
223.	Asisten Deputi Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional	15	
224.	Kepala Bidang Peningkatan Ekspor	13	
225.	Kepala Subbidang Pengembangan Produk Ekspor	11	
226.	Kepala Subbidang Pengembangan Pasar	11	



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Keterangan
	Ekspor		
227.	Kepala Bidang Fasilitas Perdagangan Internasional	13	
228.	Kepala Subbidang Pengembangan Fasilitas Perdagangan Internasional	11	
229.	Kepala Subbidang Fasilitas dan Pengendalian Impor	11	
230.	Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional	15	
231.	Kepala Bidang Kelembagaan Logistik Nasional	13	
232.	Kepala Subbidang Perizinan dan Informasi Logistik	11	
233.	Kepala Subbidang Kelembagaan Rantai Pasok	11	
234.	Kepala Bidang Peningkatan Daya Saing Pelaku Logistik	13	
235.	Kepala Subbidang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Logistik	11	
236.	Kepala Subbidang Pengembangan Penyedia Jasa Logistik	11	
237.	Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha	15	
238.	Kepala Bidang Pengembangan Pasar Dalam Negeri	13	
239.	Kepala Subbidang Penataan Pasar	11	
240.	Kepala Subbidang Penggunaan Produk Dalam Negeri	11	
241.	Kepala Bidang Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen	13	
242.	Kepala Subbidang Persaingan Usaha	11	
243.	Kepala Subbidang Perlindungan Konsumen	11	
244.	Asisten Deputi Pengembangan Industri	15	
245.	Kepala Bidang Pengembangan Industri Padat Karya	13	
246.	Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Pengembangan Industri Padat Karya	11	
247.	Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Pengembangan Industri Padat Karya	11	
248.	Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Industri	13	
249.	Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Pengembangan Teknologi Industri	11	
250.	Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan	11	



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Keterangan
	Pengembangan Teknologi Industri		
<b>Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>			
251.	Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	17	
252.	Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air	15	
253.	Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air	13	
254.	Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air	11	
255.	Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air	11	
256.	Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air	13	
257.	Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air	11	
258.	Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air	11	
259.	Kepala Bidang Program dan Tata Kelola	13	
260.	Kepala Subbidang Program	11	
261.	Kepala Subbidang Tata Kelola	11	
262.	Asisten Deputi Telematika dan Utilitas	15	
263.	Kepala Bidang Telematika	13	
264.	Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Telematika	11	
265.	Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Telematika	11	
266.	Kepala Bidang Utilitas	13	
267.	Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Utilitas	11	
268.	Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Utilitas	11	
269.	Asisten Deputi Sistem Transportasi Multimoda	15	
270.	Kepala Bidang Sistem Transportasi Jalan	13	
271.	Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Sistem Transportasi Jalan	11	
272.	Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Sistem Transportasi Jalan	11	
273.	Kepala Bidang Sistem Transportasi Non Jalan	13	
274.	Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Sistem Transportasi Non Jalan	11	
275.	Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Sistem	11	



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Keterangan
	Transportasi Non Jalan		
276.	Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi	15	
277.	Kepala Bidang Penataan Ruang	13	
278.	Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Penataan Ruang	11	
279.	Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Penataan Ruang	11	
280.	Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi	13	
281.	Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi	11	
282.	Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi	11	
283.	Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur	15	
284.	Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan	13	
285.	Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Perumahan dan Pertanahan	11	
286.	Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Perumahan dan Pertanahan	11	
287.	Kepala Bidang Pembiayaan Infrastruktur	13	
288.	Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur	11	
289.	Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur	11	
<b>Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional</b>			
290.	Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	17	
291.	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia	15	
292.	Kepala Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia Tengah dan Asia Timur	13	
293.	Kepala Subbidang Kerja Sama Ekonomi Asia Tengah	11	
294.	Kepala Subbidang Kerja Sama Ekonomi Asia Timur	11	
295.	Kepala Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia Tenggara dan Asia Selatan	13	
296.	Kepala Subbidang Kerja Sama Ekonomi Asia Tenggara	11	
297.	Kepala Subbidang Kerja Sama Ekonomi Asia	11	





**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Keterangan
	Selatan		
298.	Kepala Bidang Program dan Tata Kelola	13	
299.	Kepala Subbidang Program	11	
300.	Kepala Subbidang Tata Kelola	11	
301.	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah	15	
302.	Kepala Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa	13	
303.	Kepala Subbidang Kerja Sama Ekonomi Eropa Barat	11	
304.	Kepala Subbidang Kerja Sama Ekonomi Eropa Tengah dan Eropa Timur	11	
305.	Kepala Bidang Kerja Sama Ekonomi Afrika dan Timur Tengah	13	
306.	Kepala Subbidang Kerja Sama Ekonomi Afrika	11	
307.	Kepala Subbidang Kerja Sama Ekonomi Timur Tengah	11	
308.	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik	15	
309.	Kepala Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika	13	
310.	Kepala Subbidang Kerja Sama Ekonomi Amerika Utara	11	
311.	Kepala Subbidang Kerja Sama Ekonomi Amerika Tengah dan Amerika Selatan	11	
312.	Kepala Bidang Kerja Sama Ekonomi Pasifik	13	
313.	Kepala Subbidang Kerja Sama Ekonomi Australia	11	
314.	Kepala Subbidang Kerja Sama Ekonomi New Zealand dan Oceania	11	
315.	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional	15	
316.	Kepala Bidang Kerja Sama Ekonomi APEC dan Sub Regional	13	
317.	Kepala Subbidang Kerja Sama Ekonomi APEC	11	
318.	Kepala Subbidang Kerja Sama Ekonomi Sub Regional	11	
319.	Kepala Bidang Kerja Sama Ekonomi ASEAN	13	
320.	Kepala Subbidang Kerja Sama Ekonomi Internal ASEAN	11	
321.	Kepala Subbidang Kerja Sama Ekonomi Mitra Wicara ASEAN	11	
322.	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi	15	



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Keterangan
	Multilateral dan Pembiayaan		
323.	Kepala Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral	13	
324.	Kepala Subbidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral PBB	11	
325.	Kepala Subbidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral Non PBB	11	
326.	Kepala Bidang Kerja Sama Pembiayaan	13	
327.	Kepala Subbidang Kerja Sama Pembiayaan Pembangunan	11	
328.	Kepala Subbidang Kerja Sama Pembiayaan Perubahan Iklim	11	
<b>Staf Ahli</b>			
329.	Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum, dan Keamanan	16	
330.	Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Kemaritiman	16	
331.	Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	16	
332.	Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah	16	
333.	Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional	16	
<b>Staf Khusus</b>			
334.	Staf Khusus	16	
<b>Inspektorat</b>			
335.	Inspektur	15	
336.	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat	11	
<b>Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus</b>			
337.	Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	15	
338.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kerja Sama	13	
339.	Kepala Subbagian Perencanaan	11	
340.	Kepala Subbagian Kerja Sama	11	
341.	Kepala Bagian Pengelolaan Informasi	13	
342.	Kepala Subbagian Informasi dan Verifikasi	11	
343.	Kepala Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	11	
344.	Kepala Bagian Hukum dan Umum	13	
345.	Kepala Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat	11	



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Keterangan
346.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian, dan Keuangan	11	
347.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	11	
<b>Jabatan Fungsional Auditor</b>			
348.	Auditor Ahli Utama	14	
349.	Auditor Ahli Madya	12	
350.	Auditor Ahli Muda	10	
351.	Auditor Ahli Pratama	9	
352.	Auditor Terampil Penyelia	8	
353.	Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan	7	
354.	Auditor Terampil Pelaksana	6	
<b>Jabatan Fungsional Analis Kebijakan</b>			
355.	Analis Kebijakan Utama	14	
356.	Analis Kebijakan Madya	12	
357.	Analis Kebijakan Muda	10	
358.	Analis Kebijakan Pratama	9	
<b>Jabatan Fungsional Umum</b>			
359.	Analis Ekonomi	6	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Penata Muda/ III/a
360.	Analis Organisasi	6	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Penata Muda/ III/a
361.	Analis Tata Laksana	6	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Penata Muda/ III/a
362.	Analis Anggaran	6	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Penata Muda/ III/a
363.	Analis Manajemen Kinerja	6	Pangkat/Gol sekurang-



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Keterangan
			kurangnya Penata Muda/ III/a
364.	Analisis Monitoring dan Evaluasi	6	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Penata Muda/ III/a
365.	Analisis Data dan Informasi	6	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Penata Muda/ III/a
366.	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	6	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Penata Muda/ III/a
367.	Analisis Hukum	6	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Penata Muda/ III/a
368.	Analisis Pelaporan	6	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Penata Muda/ III/a
369.	Analisis Manajemen Kepegawaian	6	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Penata Muda/ III/a
370.	Analisis Humas dan Protokol	6	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Penata Muda/ III/a
371.	Analisis Kerumahtanggaan	6	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Penata Muda/ III/a
372.	Analisis Keuangan	6	Pangkat/Gol sekurang-



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Keterangan
			kurangnya Penata Muda/ III/a
373.	Analisis Pengelola Barang Milik Negara	6	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Penata Muda/ III/a
374.	Analisis Tata Usaha	6	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Penata Muda/ III/a
375.	Protokoler	6	Pangkat/Gol Penata Muda/ III/a
376.	Pengelola Rapat	6	Pangkat/Gol Penata Muda/ III/a
377.	Verifikator Keuangan	6	Pangkat/Gol Penata Muda/ III/a
378.	Verifikator Keuangan	5	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Pengatur/ II/c
379.	Pengelola Sistem dan Jaringan	6	Pangkat/Gol Penata Muda/ III/a
380.	Pengelola Sistem dan Jaringan	5	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Pengatur/ II/c dan setinggi-tingginya Pengatur Tingkat I/ II/d
381.	Pengelola Rapat	5	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Pengatur/ II/c dan setinggi-tingginya Pengatur Tingkat I/ II/d
382.	Petugas Protokol	5	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Keterangan
			Pengatur/ II/c dan setinggi-tingginya Pengatur Tingkat I/ II/d
383.	Petugas Protokol	4	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Pengatur Muda/ II/a dan setinggi-tingginya Pengatur Muda Tingkat I/ II/b
384.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	5	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Pengatur/ II/c dan setinggi-tingginya Pengatur Tingkat I/ II/d
385.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	4	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Pengatur Muda/ II/a dan setinggi-tingginya Pengatur Muda Tingkat I/ II/b
386.	Pengadministrasi Kerumahtanggaan	5	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Pengatur/ II/c dan setinggi-tingginya Pengatur Tingkat I/ II/d
387.	Pengadministrasi Kerumahtanggaan	4	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Pengatur Muda/ II/a dan setinggi-tingginya Pengatur Muda Tingkat I/ II/b
388.	Pengadministrasi Kepegawaian	5	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Keterangan
			Pengatur/ II/c dan setinggi-tingginya Pengatur Tingkat I/ II/d
389.	Pengadministrasi Kepegawaian	4	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Pengatur Muda/ II/a dan setinggi-tingginya Pengatur Muda Tingkat I/ II/b
390.	Pengadministrasi Rapat	5	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Pengatur/ II/c dan setinggi-tingginya Pengatur Tingkat I/ II/d
391.	Pengadministrasi Rapat	4	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Pengatur Muda/ II/a dan setinggi-tingginya Pengatur Muda Tingkat I/ II/b
392.	Pengadministrasi Anggaran	5	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Pengatur/ II/c dan setinggi-tingginya Pengatur Tingkat I/ II/d
393.	Pengadministrasi Anggaran	4	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Pengatur Muda/ II/a dan setinggi-tingginya Pengatur Muda Tingkat I/ II/b
394.	Pengadministrasi Kinerja	5	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Keterangan
			Pengatur/ II/c
395.	Pengadministrasi Kinerja	4	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Pengatur Muda/ II/a dan setinggi-tingginya Pengatur Muda Tingkat I/ II/b
396.	Pengadministrasi Barang Milik Negara	5	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Pengatur/ II/c dan setinggi-tingginya Pengatur Tingkat I/ II/d
397.	Pengadministrasi Barang Milik Negara	4	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Pengatur Muda/ II/a dan setinggi-tingginya Pengatur Muda Tingkat I/ II/b
398.	Pengadministrasi Bahan Informasi	5	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Pengatur/ II/c dan setinggi-tingginya Pengatur Tingkat I/ II/d
399.	Pengadministrasi Bahan Informasi	4	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Pengatur Muda/ II/a dan setinggi-tingginya Pengatur Muda Tingkat I/ II/b
400.	Pengadministrasi Persuratan	5	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya





**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Keterangan
			Pengatur/ II/c dan setinggi-tingginya Pengatur Tingkat I/ II/d
401.	Pengadministrasi Persuratan	4	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Pengatur Muda/ II/a dan setinggi-tingginya Pengatur Muda Tingkat I/ II/b
402.	Pengadministrasi Kearsipan	5	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Pengatur/ II/c dan setinggi-tingginya Pengatur Tingkat I/ II/d
403.	Pengadministrasi Kearsipan	4	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Pengatur Muda/ II/a dan setinggi-tingginya Pengatur Muda Tingkat I/ II/b
404.	Pengadministrasi Umum	5	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Pengatur/ II/c dan setinggi-tingginya Pengatur Tingkat I/ II/d
405.	Pengadministrasi Umum	4	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Pengatur Muda/ II/a dan setinggi-tingginya Pengatur Muda Tingkat I/ II/b
406.	Pengadministrasi Umum	3	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Juru/



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Keterangan
			I/c dan setinggi-tingginya juru Tingkat I/ I/d
407.	Pengemudi	4	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Pengatur Muda/ II/a dan setinggi-tingginya Pengatur Muda Tingkat I/ II/b
408.	Pengemudi	3	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Juru/ I/c dan setinggi-tingginya juru Tingkat I/ I/d
409.	Pramubakti	4	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Pengatur Muda/ II/a dan setinggi-tingginya Pengatur Muda Tingkat I/ II/b
410.	Pramubakti	3	Pangkat/Gol sekurang-kurangnya Juru/ I/c dan setinggi-tingginya juru Tingkat I/ I/d

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**DARMIN NASUTION**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan  
Hubungan Masyarakat,



Elen Setiadi, S.H., M.S.E.  
NIP. 197409011996031001